

Globalisasi dan Diaspora Cina dalam Perspektif Post-Kolonial: Dinamika Strategi Ekonomi dan Identitas Budaya

Arie Setyaningrum^{*)}

Abstract

This article attempts to draw the effect of globalization shown through the success of Chinese Diaspora in pursuing global capitalism across national and cultural borders which in turn enriched cultural values and class strategy. The countercultural-production of diasporan Chinese is a complex dynamic process rooted in the history of diasporan and European colonialism. In regard to this phenomenon, this article focuses on several issues of how globalization provides opportunities for establishing capital networks despite socio-political obstacles in the host countries. To some extent, the effect of globalization will also generate hybrid culture between the sense of being Chinese and adopted local identities.

Kata-kata Kunci:

globalisasi; diaspora China; post-kolonial; identitas budaya

Pengantar

Artikel ini bertujuan untuk meninjau bagaimana efek globalisasi yang ditunjukkan melalui kesuksesan etnis perantauan Cina (*Chinese*

^{*)} *Arie Setyaningrum* adalah staf pengajar di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta. Mengembangkan minat pada isu-isu budaya khususnya Cultural Studies dan studi Post-Kolonial.

diaspora) dalam meraih kapitalisme global melampaui batas-batas nasional maupun kultural, yang pada gilirannya memperkaya strategi kebudayaan sekaligus strategi kelas mereka. Produksi budaya tanding (*countercultural production*) yang dilahirkan melalui persebaran etnis perantauan Cina ini merupakan suatu proses dinamis yang sangat kompleks dan berakar dalam sejarah diaspora yang disebarkan melalui kapitalisme kolonial Eropa. Secara khusus, artikel ini melihat fokus mengenai isu-isu kritis tentang bagaimana globalisasi menyediakan peluang bagi sekelompok orang untuk mengikuti semangat kapitalisme mereka dengan membangun jaringan yang melampaui batas-batas nasional dan geografis.

Hal ini meliputi berbagai strategi yang diperankan oleh etnis perantauan Cina dalam mengatasi hambatan-hambatan ekonomi, sosial maupun politik di negara tempat mereka saat ini tinggal. Lebih jauh, fokus ini akan melihat bagaimana globalisasi mempengaruhi pembentukan identitas kultural tertentu bagi etnis perantauan Cina ini yang dalam wacana budaya kontemporer telah menciptakan apa yang disebut sebagai 'budaya hibrid' (*hybrid culture*) yakni suatu proses tarikan antara 'sense sebagai orang Cina' (*sense of being Chinese*) dengan identitas lokal yang mereka adopsi sebagai bagian dari identitas kultural 'baru' mereka sebagai bagian dari komunitas suatu negara-bangsa.

Latar Belakang Sejarah Diaspora Cina

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah 'diaspora' disini merujuk pada konteks post-kolonial yang melingkupi situasi politik maupun budaya yang berakar dalam kolonialisme Barat sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, saat pergerakan diasporik berlangsung secara konsisten sebagai akibat dari tercerabutnya sekelompok orang dari wilayah jajahan di Dunia Ketiga ke pusat-pusat kapitalis metropolitan Barat (Wu, 1991). Walaupun demikian, asal-usul pergerakan diasporik ini dapat ditemui dalam sejarah peradaban klasik jauh sebelum dimulainya era kolonialisme Barat, seperti misalnya sejarah persebaran (diapora) etnis Yahudi. Menurut Laevi dan Swedenburg (1991), diaspora merupakan suatu migrasi secara massif kelompok-kelompok orang kulit berwarna (non-kulit putih/Eropa) ke 'jantung pusat Eropa' selama dan sesudah kolonialisme Barat. Sementara itu, menurut Wang Gung Wu di dalam bukunya '*China and the Chinese Overseas*' (1991), sejarah

diaspora Cina memiliki setidaknya empat pola migrasi, yakni: sebagai kuli (*Huagong*), sebagai pedagang (*Huangshang*), sebagai perantauan (*Huaqiao*), dan sebagai keturunan perantauan Cina yang bermigrasi ke tempat yang lainnya (*Huayi*).

Dalam pola-pola migrasi tersebut, terdapat berbagai karakteristik yang berbeda dan juga sejarah yang khusus. Pola migrasi sebagai kuli (*the coolie-pattern/ Huagong*), pada awalnya muncul sebagai akibat dari dihapusnya perbudakan di Barat pada saat banyak etnis perantauan Cina dipekerjakan sebagai buruh-buruh bagi perkebunan, pertambangan, pembangunan konstruksi jalan raya dan rel kereta api, di Amerika Utara, Asia Tenggara, dan Australia. Sebagai upaya untuk dapat bertahan baik secara fisik maupun secara psikologis, etnis perantauan Cina ini berupaya untuk mempertahankan bahasa mereka serta mempraktekkan ritual dan kebudayaan mereka dalam suatu komunitas terbatas yang ikut mempengaruhi terbentuknya wilayah-wilayah pemukiman orang-orang Cina seperti *Chinatown*. Pola migrasi sebagai pedagang (*Huangshang*) merujuk pada sekelompok etnis perantauan Cina yang bekerja sebagai pedagang atau sebagai pekerja yang memiliki keahlian tertentu yang mendiami wilayah seperti pelabuhan ataupun pusat-pusat perdagangan. Kelompok pedagang ini menggunakan norma-norma Cina dalam mengelola hubungan bisnis mereka termasuk dalam bernegosiasi, sementara mereka juga mulai menerima bahasa dan norma-norma sosial setempat. Menurut Wang Gung Wu, dalam pola kedua ini, berlangsung asimilasi budaya antara sense sebagai orang Cina maupun nilai-nilai (khususnya Barat) yang dianut masyarakat setempat. Sementara itu pola ketiga, yakni sebagai perantauan (*Huaqiao*) berlaku bagi seluruh etnis Cina yang tersebar di seluruh dunia di luar daratan Cina (*Mainland China*), apapun jenis pekerjaan mereka. Lebih jauh Wang Gung Wu menilai bahwa "*Huaqiao*" menjadi suatu fenomena migrasi yang amat terkenal khususnya sejak terjadinya kekacauan politik yang berlangsung di daratan Cina antara tahun 1900-1911 sebagai akibat dari pergerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Jenderal Sun Yat Sen. Sedangkan pola migrasi ke empat (*Huayi*), merupakan pola migrasi yang dilakukan oleh keturunan etnis Cina yang sudah lama menetap di suatu tempat seperti misalnya di Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia), dan melakukan migrasi ke negara-negara lain seperti ke Kanada, Eropa Barat dan Australia.

Pergerakan diasporik dari tipe ke empat ini sudah merupakan kecenderungan yang terus berlangsung selama tiga puluh tahun terakhir ini. Dalam tipe terakhir inilah kita menemukan sekelompok orang yang benar-benar terdidik dan memiliki budaya yang unik, bahkan mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai '*Cosmopolitan Chinese*'. Pola-pola tersebut menjelaskan latar belakang sejarah dari berbagai bentuk migrasi orang-orang Cina ke berbagai tempat dalam kurun waktu yang berbeda.

Meskipun demikian, banyak sekali alasan yang dapat mendorong terjadinya pergerakan diasporik ini. Mang Mu (1998) misalnya, menjelaskan bahwa terdapat berbagai alasan yang memotivasi migrasi orang-orang Cina ini. Alasan tersebut bervariasi, mulai dari ketercerabutan sekelompok orang secara sosial maupun politik hingga akibat dari penderitaan yang disebabkan oleh keterbatasan kondisi geografsis tempat tinggal asal mereka karena kurangnya sumber daya alam. Menurut Mang Mu, mayoritas dari etnis perantauan Cina berasal dari wilayah propinsi seperti Fujian, Guangdong, dan Hainan, yang populasi dari ketiga wilayah itu merepresentasikan hanya 10 % saja dari total populasi di Republik Rakyat Cina (RRC). Pandangan Mang Mu ini didukung oleh Scarborough (1998) yang mendapati bahwa diaspora Cina berakar pada kondisi fisik yang turut mempengaruhi pembentukan nilai-nilai budaya. Tempat asal-muasal para perantauan Cina ini kebanyakan merupakan wilayah pegunungan yang curam dan tanah pertaniannya memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah atau wilayah yang sangat padat sekali penduduknya meskipun mereka tinggal di lembah-lembah pinggir sungai yang subur tanahnya. Akibatnya, kemiskinan berkaitan dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian yang subur, kondisi inilah yang mendorong mereka untuk pergi meninggalkan tanah kelahiran dan membangun harapan di tanah yang baru (Mu, 1998).

Sementara itu, apabila kita merujuk pada dimensi historis maka karakteristik pergerakan diasporik Cina berlangsung pada periode sejarah yang berbeda-beda. Migrasi orang-orang Cina pada awalnya berlangsung pada abad ke 3 Masehi, yakni pada masa dinasti Han ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara dan berlangsung hingga abad ke-18 (Wu, 1991). Lynn Pan (1990), secara lengkap menggambarkan bahwa pada abad ke-15, Laksamana Zheng telah memimpin 300 buah kapal yang berlayar di wilayah Asia Tenggara untuk menjalin hubungan

perdagangan dengan penduduk lokal setempat dan untuk menunjukkan kejayaan dinasti Ming. Menurut Lynn Pan, gelombang migrasi etnis Cina yang terbesar berlangsung pada masa berakhirnya kolonialisme di awal abad ke-20, ketika orang-orang Cina datang ke Asia Tenggara sebagai buruh tani dan pekerja kasar yang miskin. Sebagian diantaranya, bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan karet milik Barat ataupun di pertambangan yang kemudian beranjak menjadi para pedagang kecil. Ketika para penjajah Barat mulai angkat kaki dari wilayah di Asia Tenggara setelah Perang Dunia II, orang-orang Cina ini secara sederhana hanya mewarisi kemampuan sebagai 'businessman lokal'. Sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, migrasi orang-orang Cina lebih dikarenakan pembukaan wilayah-wilayah koloni Barat serta adanya kekacauan politik dan sosial di Daratan Cina, yang mengakibatkan setidaknya 500.000 orang Cina tersebar di berbagai wilayah di luar Daratan Cina di seluruh dunia (Kraar, 1994). Sementara, fenomena kontemporer migrasi etnis Cina berlangsung sejak terpecahnya Tanah Air Cina pada tahun 1949 yang melahirkan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Republik Cina-Taiwan. Berbeda dengan pola-pola migrasi etnis Cina di masa sebelum dan pada saat berlangsungnya kolonialisme, migrasi kontemporer ini lebih banyak diakibatkan oleh alasan yang bersifat mandiri (bukan diakibatkan oleh pencerabutan sosial ataupun politik), melainkan lebih diakibatkan oleh terbentuknya jaringan (*networks*). Hingga akhir abad ke-20, terdapat 55 juta orang etnis perantauan Cina di seluruh dunia yang secara mengejutkan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru, khususnya di wilayah Pacific Rim (lingkaran Pasifik).

Jaringan *Guanxi*: Ikatan Paternal dan Pembentukan Kapitalisme Global

Sejarah berlangsungnya diaspora Cina, merupakan embrio bagi lahirnya trans-nasionalisme Cina modern, sebagaimana yang telah dibahas di muka, berakar dari konteks kolonialisme Barat di Asia Tenggara, Australia, Kepulauan Pasifik, dan Pantai-Pantai Barat di Amerika Utara. Fenomena diaspora Cina ini tidak dapat dipisahkan dari politik budaya yang berlangsung saat ini dalam kapitalisme global. Hal ini mengandung pengertian bahwa trans-nasionalisme Cina modern berkembang secara pesat mengikuti strategi-strategi maupun '*networking*'

yang diperoleh melalui berlangsungnya kapitalisme global. Kondisi pergerakan diasporik Cina ini setidaknya menunjukkan bahwa dampak globalisasi berpengaruh secara nyata terhadap *nation-state*, pembentukan identitas kultural termasuk identitas etnis, transformasi pertumbuhan kelas, dan secara spesifik pada identitas politik yang berlangsung diantara etnis perantauan Cina itu sendiri. Menanggapi kaitan di antara berbagai aspek tersebut, Nonini dan Ong (1997) menyatakan bahwa terdapat dua elemen kapitalisme yang berkaitan dengan trans-nasionalisme Cina yakni, strategi memperluas jaringan (*the strategies of expanding networks*) dan peluang-peluang yang diciptakan oleh kapitalisme global (*opportunities created by the global capitalism*) sebagaimana yang dapat kita lihat melalui peranan dari berbagai rezim pemerintah di pelbagai negara untuk mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi etnis perantauan Cina.

Elemen pertama (*the strategies of expanding networks*) berkaitan dengan strategi yang bersifat fleksibel yang dikembangkan oleh para kapitalis etnis perantauan Cina dalam memperluas dan mengambil manfaat dari pembentukan jaringan yang mampu melampaui batas-batas sosial maupun politik. Dalam hubungan ini, jaringan bisnis maupun hubungan kekerabatan (*kinship*) berlangsung secara dinamis yang mampu menghubungkan etnis perantauan Cina di luar negeri dengan kerabat-kerabat mereka di Daratan Cina. Sementara, elemen kedua (*opportunities created by the global capitalism*) meliputi kepentingan-kepentingan terhadap keuntungan ekonomi yang muncul dari pasar global yang telah mendorong berbagai rezim pemerintahan di berbagai negara yang menawarkan status politik bagi etnis perantauan Cina. Kedua elemen ini juga berpengaruh terhadap strategi maupun identitas budaya yang berkembang di kalangan etnis perantauan Cina. Untuk menjelaskan strategi etnis perantauan Cina dalam kaitannya dengan kapitalisme global, maka ada dua aspek yang akan dibahas dalam artikel ini, yakni: *pertama*, landasan etnis yang didasari oleh ikatan-ikatan paternal maupun kekerabatan yang kemudian mempengaruhi perluasan jaringan; *kedua*, bagaimana pergerakan trans-nasional ini secara ekonomi maupun politis telah mempengaruhi konstruksi identitas budaya maupun politik di kalangan etnis perantauan Cina.

Ketika melihat lebih dekat situasi terkini dalam perkembangan kapitalisme mutakhir, menurut Mike Featherstone (1990) menyarankan untuk melihat peralihan kapitalisme dari produksi industri massa ke rezim-rezim yang bersifat global dari akumulasi yang bersifat fleksibel (*the globalised regimed of flexible accumulation*) yang bermuara pada proses perburuhan (*labor process*), penciptaan pasar-pasar baru (*creating new markets*), distribusi dan cara-cara mengkonsumsi (*distribution and mode of consumption*). Nonini (1997) menyatakan bahwa peralihan ini ditandai melalui terbentuknya industri-industri sub-kontrak yang mengorganisir proses perburuhan dan bahkan telah mengelaborasi proses ekonomi dengan proses budaya sebagaimana yang pada umumnya bisa ditemui sejak berdirinya *Multi National Corporations* (MNC's) yang beroperasi melampaui batas-batas politik dan budaya. Lebih jauh, produksi global membutuhkan terciptanya pasar-pasar baru dengan mempertimbangkan populasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara-cara orang mengkonsumsi sesuatu. Jadi, aktivitas-aktivitas ekonomi global telah menawarkan berbagai macam peluang bagi kepentingan untuk terus mengakumulasikan kapital. Dapat dikatakan pula, bahwasanya aktivitas-aktivitas ekonomi ini telah berlangsung secara intensif melalui mobilitas yang terus meningkat baik yang melibatkan mobilitas kapital, maupun orang (manusia) yang memberi karakteristik khusus bagi trans-nasionalisme modern.

Menurut Aihwa Ong (1999), trans-nasionalisme modern Cina mengambil bentuknya melalui elemen-elemen etika kekeluargaan (*familial ethic*) yang menjadi landasan bagi ikatan-ikatan paternal dan peranan pasar global serta produksi ekonomi yang meliputi strategi membangun jalur (*channelling*) bagi sumber-sumber kapitalisme global. Etika familial ini diambil dari konsep Konfusian mengenai 'ketaatan dan kepatuhan' (*xiao*), yang menjadi basis moral bagi kewajiban setiap individu yang memasuki kapitalisme. Etika ini mengatur relasi antara superior-subordinan (ayah-anak lelaki, suami-istri, kakak-adik). Meskipun Konfusianisme juga mengajarkan kewajiban individu kepada bangsa, secara pragmatis hal ini lebih dipahami sebagai kewajiban yang terpusat pada kepentingan-kepentingan kekeluargaan (kekerabatan). Dengan kata lain, keluarga merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan khususnya bagi etnis perantauan Cina. Di dalam etika ini, keluarga merupakan unit utama dari suatu masyarakat, bukan

individu-individu (Mak dan Chan, 1995). Lebih jauh, Mak dan Chan mengatakan bahwa identitas individual didefinisikan dalam pengertian yang berkaitan dengan peran-peran serta hubungan inter-personal di dalam keluarga, ketimbang sebagai suatu identitas yang dibangun oleh upaya dan perjuangan personal seseorang bagi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, membawa keberuntungan bagi keluarga merupakan tugas utama bagi setiap orang Cina, yang berarti pula memelihara kemakmuran dan mengelola kohesi keluarga dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut. Menurut Robert Hefner (1998), berbeda dengan tipe ideal keluarga Barat sebagai suatu asosiasi sukarela yang bersifat 'co-equal' (setara), maka keluarga Cina bersifat patrilineal dan cenderung bersifat patriarkhis. Ini berarti terdapat suatu otoritas yang dijalankan oleh mereka yang superior (kakak terhadap adik, orang tua terhadap anak, serta suami terhadap istri). Superioritas yang mereka miliki merupakan klaim untuk memaksa anggota keluarga yang lain bekerja untuk mengakumulasikan keuntungan (profit) bagi keluarga mereka. Hefner melanjutkan bahwa logika dalam menerapkan praktek semacam ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwasanya anak diharapkan untuk membayar hutang mereka kepada orang tua dikarenakan upaya dalam mengasuh dan membesarkan mereka. Jadi, membangun bisnis keluarga dan memeliharanya merupakan pilihan yang tak terhindarkan bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dicermati dari kesediaan anak-anak untuk bekerja bagi orang tua mereka tanpa dibayar, serta loyalitas mereka terhadap relasi kekerabatan (*kinship relations*) dengan mempekerjakan saudara-saudara dan teman-teman mereka (Wu, 1999).

Fenomena perusahaan-perusahaan milik keluarga Cina yang dijalankan oleh keturunan mereka dapat ditemui dimanapun di penjuru dunia. Fenomena jaringan bisnis kekerabatan Cina ini bahkan menjadi kekuatan ekonomi dunia ke-empat yang terbesar setelah Amerika Utara, Jepang, dan Eropa (Kao, 1993). Bisnis semacam ini terbentuk melalui proses berbagi suatu budaya yang dimiliki bersama serta bekerja di dalam suatu jaringan hubungan-hubungan kewirausahaan, yang disebut oleh Kao sebagai 'the Chinese Commonwealth' (Persemakmuran Cina). Meskipun perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga Cina ini tersebar di berbagai tempat di dunia, sesungguhnya mereka memiliki karakteristik unik yang beragam. Scarborough (1998) menemukan bahwa dikarenakan esensi dari suatu perusahaan

merupakan suatu kepemilikan keluarga, posisi-posisi top manajemen diisi oleh anggota-anggota keluarga terdekat dengan kepala keluarga diasumsikan sebagai pemegang perintah yang utama. Mereka yang bukan anggota keluarga, dapat mengisi posisi-posisi penting di dalam suatu perusahaan setelah terbukti mampu untuk sekian lama mengabdikan dan dapat dipercaya bagi perkembangan usaha perusahaan tersebut. Ideologi manajerial dibentuk pula oleh nilai-nilai budaya Cina seperti misalnya, kewajiban hierarkhis yang bersifat timbal-balik, serta otokrasi yang bersifat murah hati (*benevolent autocracy*) meskipun otoritas dan kontrol sangat terpusat. Dalam ideologi semacam ini, koordinasi sistem internal dan kontrol sangat bersifat personal.

Pasar dan produksi ekonomi global telah menciptakan arus kapital yang memungkinkan orang-orang Cina menyesuaikan budaya melalui berbagai strategi. Ketika ekonomi berkembang pesat, maka etnis perantauan Cina telah mengambil keuntungan dengan menciptakan strategi hubungan kekerabatan melalui: *pertama*, melalui relokasi dan persebaran anggota keluarga mereka, dan kedua dengan memanfaatkan jaringan yang disebut sebagai '*Guanxi*' di Daratan Cina. Dalam strategi yang pertama, anggota keluarga diperintahkan untuk membangun perusahaan-perusahaan keluarga di berbagai tempat berbeda yang mampu mendatangkan keuntungan. Sementara, strategi kedua adalah membangun koneksi (hubungan) melalui jaringan '*Guanxi*' yang mensuplai produksi barang untuk diekspor ke negara-negara tempat para pengusaha-etnis perantauan Cina ini tinggal. Etika Konfusianisme mengenai kapitalisme mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk mengikuti arus sumber-sumber kemakmuran. Oleh karena itu, mereka harus pergi dari tanah kelahiran untuk memperoleh peruntungan dimanapun di seluruh muka bumi. Ketika suatu perusahaan keluarga menjadi bertambah besar, biasanya para senior menugaskan para junior untuk membangun usaha mereka di tempat-tempat yang baru. Proses pembentukan jaringan dan perdagangan inter-regional ini 'distrukturkan melalui ikatan-ikatan paternal dan relasi-relasi interpersonal' dari para *huaqiao* (etnis perantauan Cina) inilah yang kemudian menjadi komunitas imajiner (*imagined communities*) yang berbasis pada jaringan perdagangan (Ong, 1999).

Di dalam jaringan ini, mereka saling berbagi informasi mengenai kondisi-kondisi pasar yang disyaratkan oleh kapitalisme global modern.

Dengan memanfaatkan jaringan ini, mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan pasar global dan melibatkan (*incorporate*) seluruh inovasi-inovasi teknologi canggih untuk mendukung upaya tersebut. Dalam upaya untuk mentransformasikan kebutuhan pasar ke dalam berbagai produk tertentu, etnis perantauan Cina menggunakan hubungan paternal mereka dengan komunitas di Daratan Cina, yang disebut sebagai jaringan '*Guanxi*'. Jaringan '*guanxi*' terbentuk melalui ikatan-ikatan kekerabatan (*familial kinship*) dimana para kerabat di Daratan Cina membangun industri sub-kontrak untuk memproduksi berbagai macam barang kebutuhan ekspor yang akan dijual kembali di negara-negara tempat para pengusaha etnis perantauan Cina itu tinggal. Strategi-strategi semacam ini telah melahirkan suatu dampak di dalam reproduksi kelas baru bagi etnis perantauan Cina yang melahirkan para konglomerat termasuk di Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Australia. Meskipun ada suatu sentimen patriotik di dalam proses membangun jalur bagi jaringan '*guanxi*' ini, motivasi untuk memperoleh buruh yang murah merupakan motif kapitalis yang paling menonjol (Hefner, 1998). Meskipun 'jaringan *guanxi*' menjadi suatu '*mode of production*' yang secara khusus telah mengakumulasikan kapital para pengusaha-etnis perantauan Cina, jaringan itu justru telah menjebak khususnya kaum perempuan di Daratan Cina tetap berada dalam kondisi kemiskinan (Weller, 1998). Jadi, para pengusaha-etnis perantauan Cina ini telah mengambil keuntungan dari kondisi-kondisi sosial-politik di Daratan Cina mengingat tidak ada kondisi politik tertentu yang disyaratkan oleh pemerintah lokal bagi kegiatan bisnis tersebut (Hefner, 1998).

Ekonomi dan Budaya Hibrid Diaspora Cina: Kewarganegaraan Fleksibel dan Konstruksi Identitas

Semenjak meluasnya pasar global, kewarganegaraan (*citizenship*) menjadi suatu isu yang penting berkaitan dengan kalkulasi ekonomi etnis perantauan-Cina yang berkaitan dengan globalisasi. Aihwa Ong (1999), menggunakan konsep '*flexible citizenship*' untuk menekankan strategi yang dimainkan oleh para manajer, teknokrat, serta kaum profesional untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai rezim negara-bangsa melalui pemilihan lokasi bagi investasi dan menjalankan bisnis berdasarkan relokasi keluarga (*family relocation*). Menurut Ahwa Ong, '*flexible citizenship*' merupakan suatu bentuk dari

strategi mereka di dalam menghadapi regulasi. Pendapat Michel Foucault dapat mendukung asumsi teoritik Aihwa Ong ini, yakni dengan merujuk pada penekanan mengenai kekuasaan modern yang dibentuk melalui populasi dan kesejahteraan bagi populasi tersebut merupakan kekuatan bio-politics yang dibangun oleh relasi-relasi produktif, ritual, bahkan kepercayaan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi yang mendukung 'bio-politics' suatu keluarga, harus diatur melalui aktivitas ekonomi yang produktif dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Secara khusus, Donald Nonini dan Aihwa Ong (1997) menyebutkan bahwa, nilai-nilai keluarga, jaringan '*guanxi*', sentimen (*ganqing*), serta kepercayaan (*xinyong*) diidentifikasi sebagai elemen-elemen fundamental bagi etika kapitalisme Cina.

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan kapitalisme bagi orang Cina memperoleh bentuknya di dalam landasan kepentingan keluarga melalui produksi norma-norma keseharian untuk mendukung perbaikan kesejahteraan keluarga. Etika semacam ini, disebut oleh Hamilton (1998) sebagai '*utilitarian familialism*' (nilai-nilai keluarga-bersifat utilitarian), dengan menempatkan kepentingan keluarga sebagai prioritas utama di atas kepentingan lainnya (individu atau sosial). Lebih lanjut, situasi ini menciptakan saling-ketergantungan (*interdependency*) secara ekonomi yang dapat mempertemukan seluruh anggota keluarga dan kerabatnya di dalam kepentingan bersama. Dengan demikian, prinsip moral dibangun melalui aktivitas memperoleh penghasilan dan kepatuhan terhadap kewajiban keluarga. Menurut Hamilton, penjelasan analisis sosial mengenai perkembangan pesat ekonomi Hong Kong sebagai sebuah negara manufaktur terbesar, tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga yang menentukan peran-peran individu untuk meraih mobilitas vertikal bagi keluarga. Strategi yang telah menggabungkan kepentingan ekonomi dan praktek budaya dari kalangan diaspora Cina ini pada gilirannya telah memberi bentuk yang khusus dalam pembentukan identitas modern trans-nasional Cina. Kepentingan ekonomi telah membentuk identitas, sebagaimana yang dapat dilihat melalui aktivitas 'mencari uang' serta memperluas jaringan sebagai tugas utama bagi kebanyakan perusahaan Cina. Hal ini diilustrasikan oleh Victor Hung, seorang CEO dari bank investasi Prudential Asia di Hong Kong sebagai berikut:

Apabila anda mempertimbangkan terbentuknya suatu kerjasama (partnership) baru, maka referensi personal dari salah satu anggota keluarga pemilik perusahaan terhormat jauh lebih berharga ketimbang sejumlah uang yang anda letakkan di atas meja saya. (Kraar, 1994, hal.1)

Proses percampuran antara kepentingan ekonomi dan budaya ini telah melahirkan suatu fenomena di dalam modernitas yang oleh Mike Featherstone (1990) disebut sebagai *'The Third Culture'* (Budaya Ketiga). Budaya-Ketiga mengacu pada produk-produk globalisasi yang muncul dari proses ekonomi trans-nasional baru yang mentransendesikan poros batas-batas politik negara-bangsa. Di dalam definisi ini, Featherstone memasukkan kelompok-kelompok yang mengalami masalah-masalah yang bersifat ambigu dalam komunikasi inter-kultural di satu sisi, dan kebutuhan untuk melampaui perbedaan kultural tersebut di sisi yang lain. Donald Nonini dan Aihwa Ong (1997) berpendapat bahwa transnasional Cina yang telah membentuk semacam *'Dunia Ketiga'* itu, dimunculkan oleh pola-pola kapitalis global yang menyediakan wacana kultural, pengaturan-pengaturan sosial yang bersifat khusus, serta praktek dan subyektivitas bagi modernitas Barat. Menurut Mayfair Yang (2000), proses semacam ini disebut sebagai *'hibridisasi ekonomi dan budaya.'* Mayfair Yang menggunakan istilah *'hibrid'* sebagai metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis (bentuk) yang memunculkan sifat tertentu dari masing-masing bentuk sementara sekaligus juga meniadakan sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Jadi, kombinasi antara motif-motif ekonomi dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh etnis perantaraan-Cina dipraktikkan melalui loyalitas terhadap ikatan keluarga, keyakinan terhadap *'nilai-nilai tentang kerja keras,'* dan ketelitian. Representasi dari proses hibridisasi ini dapat dicermati dari petikan pernyataan seorang pengusaha Cina sebagai berikut:

Kehilangan uang adalah kejahatan bagi masyarakat", begitu kata Kao-Chin Yen, 65 tahun-wakil direktur sebuah perusahaan di Taiwan yang memperoleh keuntungan US \$ 905 juta/tahun. "Jika bisnis kami ini kolaps, maka saya merasa seperti ingin bunuh diri saja, sedangkan bekerja merupakan suatu kebiasaan, yang apabila tidak saya kerjakan, maka saya merasa sakit. (Kraar, 1994, hal.3)

Mayfair Yang (2000) menambahkan, hibridisasi dalam dunia moderen dapat diartikan sebagai '*deteriolisation culture*' (proses penghambatan budaya) yang mengacu pada transplantasi Dunia Ketiga atau budaya-budaya non-Barat, serta ekonomi kapital mereka ke dalam Dunia Pertama (Barat). Mayfair Yang berpendapat bahwa di dalam hibridisasi ini terdapat kolaborasi antara tradisi turun-temurun berdasarkan produksi rumah-tangga, pasar ekonomi dan pengenalan pada kapitalisme luar negeri. Sementara itu, penekanan antara kaitan proses hibridisasi dengan konstruksi identitas diaspora ini oleh Aihwa Ong (1999) berhubungan dengan peran agen-agen internasional (rezim negara) yang memberi peluang melalui terbukanya status kewarganegaraan (*citizenship*) yang bersifat fleksibel. Aihwa Ong menggunakan '*flexible citizenship*' untuk melihat strategi para profesional dalam memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai macam rezim pemerintah di berbagai negara melalui seleksi lokasi investasi. Dalam kasus semacam ini, identitas nasional berkaitan erat dengan konsep modern mengenai komunitas politik atau yang seringkali dipahami sebagai konsep mengenai '*citizenship*.' Meski demikian, harus ada kehati-hatian dalam menggunakan pengertian mengenai '*citizenship*' ini, karena konsep tersebut dapat mengacu pada identitas politik yang bersifat legal, meskipun pengertian mengenai '*nation*' (bangsa) dapat diartikan baik sebagai identitas kultural maupun identitas politik. Akan tetapi, *flexible citizenship* telah banyak mempengaruhi aturan-aturan keimigrasian yang memungkinkan berbagai rezim pemerintah dari berbagai negara yang berbeda dalam menerima imigran yang dianggap dapat membawa keuntungan ekonomi bagi negara mereka.

Meskipun diaspora Cina secara umum dianggap sukses dalam mencari peruntungan di berbagai belahan dunia, bukan berarti mereka tidak pernah menghadapi hambatan, terutama hambatan kultural. Leo Suryadinata (1997) menggambarkan bagaimana etnis perantauan Cina di Indonesia mengalami berbagai macam tekanan dan perlakuan diskriminatif sekaligus menjadi alat produksi bagi pemerintah (Orde Baru) di dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Dalam menghadapi berbagai macam tekanan tersebut, Ling-Chi Wang (1994) menjelaskan bahwa etnis minoritas Cina memfungsikan apa yang disebutnya sebagai '*situational ethnicity*' (etnisitas situasional) dalam upaya mengkonsolidasikan keterkaitan mereka dengan kelas-kelas yang

berkuasa dan tanpa bermaksud untuk melakukan tindakan subversi. Dalam berbagai peristiwa, etnis perantauan Cina mampu bertahan di dalam budaya yang beraneka ragam, maupun di dalam situasi politik sebagai tantangan yang terus mereka warisi dari generasi ke generasi. Etnisitas situasional ini menurut Ling-Chi Wang dapat ditemui pada abad ke-19 hingga akhir awal abad ke-20 di Asia Tenggara, tempat peranakan Cina merangkul berbagai identitas yang meliputi identitas lokal, nasionalisme, komunal, sekaligus identitas etnis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa diaspora Cina telah mengembangkan dan menyebarkan berbagai macam identitas dalam rangka memenuhi tuntutan yang muncul dari situasi-situasi yang bersifat spesifik. Lalu, identitas manakah yang akan disandang oleh etnis perantauan Cina ini? Sangat tergantung pada keseimbangan antara kondisi mereka sebagai suatu kelompok dengan iklim sosial dan politik di tempat mereka tinggal sekarang. Aihwa Ong berpendapat, strategi kapitalisme diaspora Cina, mungkin dapat menjadi identitas alternatif untuk merekonstruksikan dunia Barat, meskipun tentu saja pembentukan identitas di antara diaspora Cina ini sangatlah beragam, tergantung pada tempat dan kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat. Lokasi dan kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat tersebut juga turut mempengaruhi formasi identitas kolektif yang unik dalam merespon kapitalisme global. Meskipun kapitalisme global telah memungkinkan diaspora Cina untuk saling berhubungan satu-sama lainnya melalui jaringan global, lokasi serta jarak yang diakibatkan oleh perbedaan praktek politik dapat melahirkan berbagai macam varian dari 'sense sebagai orang Cina.'^{***}

Daftar Pustaka

- Featherstone, Mike (1990). *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity: A Theory, Culture and Society, Special Issues*. London: Sage.
- Hamilton, Garry (1998). 'Culture and Organization in Taiwan's Market Economy.' Dalam Robert W. Hefner, *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalism*. Oxford: Westview Press.
- Hefner, Robert W. (1998). *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalism* (introduction). Oxford: Westview Press.
- Kao, J. (1993). 'The Worldwide Web of Chinese Business.' *Harvard Business Reviews*. Hal.23.
- Kraar, Louis (1994). 'The overseas Chinese: lessons from the world's most dynamic capitalists.' (Special Report), *Fortune* Vol. 130. pp. 1-10.
- Lavie, Smadar dan Ted Swedenburg. (1991). 'Introduction: Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity.' Dalam Smadar Lavie dan Ted Swedenburg (ed). *Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity*. Durham: Duke University Press. Hal 1-25.
- Mak, Anita dan Helen Chan (1995). 'Chinese Family Values in Australia.' Dalam Robyn Hartley (ed). *Families and Cultural Diversity in Australia*. Sydney: Australian Institute of Family Studies.
- Mu, Emanuel Mang (1998). 'Economic Arrangement and Spatial Resources: Elements of a Diaspora Economy.' Dalam Wang Ling-chi dan Wang Gung Wu (ed). *The Chinese Diaspora, selected essays Volume II*. Singapore: Times Academic Press.
- Nonini, Donald (1997). *Underground Empires: The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism* (introduction). New York: Routledge.

- Nonini, Donald dan Aihwa Ong (1997). 'Chinese Transnationalism as an Alternative Modernity.' Dalam Donald Nonini (ed.). *Underground Empires: The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism*. New York: Routledge
- Ong, Aihwa (1999). *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality*. London: Duke University Press. Hal.110-136.
- Pan, Lynn (1990). *Sons of the Yellow Emperor: A History of the Chinese Diaspora*. London: Little, Brown & Company.
- Scarborough, Jack. (1998). 'Comparing Chinese and Western Cultural Roots: Why East is East and....,' in *Business Horizons Vol.4*. JAI Press Inc. Hal 2-14.
- Suryadinata, Leo (1997). 'Ethnic Chinese in Southeast Asia.' Dalam Leo Suryadinata (ed). *Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asian*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
- Yang, Mayfair (2000). 'Putting Global Capitalism in Its Place.' *Current Anthropology*, Vol. 41.
- Weller, Robert P. (1998). 'Divided Market Cultures in China: Gender, Enterprise, and Religion.' Dalam Robert W Hefner (ed). *Market Cultures: Society and Morality in the New Asian Capitalism*. Oxford: Westview Press.
- Wang, Ling-Chi L. (1994). 'Roots and the Changing Identity of the Chinese in the United States.' Dalam Tu Wei-Ming (ed). *The Living Tree, The Changing Meaning of Being Chinese Today*. Stanford: Stanford UP. Hal. 185-212.
- Wu, Wang Gu (1991). *China and the Chinese Overseas*. Singapore: Times Academic Press.
- Wu, Wang Gu (1999). 'Chineseness: The Dilemmas of Place and Practice.' Dalam Gary Hamilton (ed). *Cosmopolitan Capitalists: Hong Kong and the Chinese diaspora at the end of twentieth century*. Washington DC: University of Washington Press.